

**Analisis kebijakan fasilitas pajak pertambahan nilai tidak dipungut atas impor barang kena pajak untuk kegiatan pemanfaatan panas bumi =
Analysis of non-collected value added tax facilities policy on imports of taxable goods used for geothermal utilization activities**

Nimas Setia Ningsih, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20491041&lokasi=lokal>

Abstrak

Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut atas impor Barang Kena Pajak untuk kegiatan pemanfaatan panas bumi merupakan kebijakan untuk mendukung program pemerintah terkait ketersediaan listrik. Sebelumnya atas impor tersebut telah diberikan fasilitas dibebaskan. Industri pertambangan yang mendapatkan fasilitas ini hanya industri panas bumi. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin menganalisis kebijakan fasilitas tersebut ditinjau dari asas netralitas dan asas keadilan dan menganalisis implikasi diberikannya fasilitas tersebut terhadap beban Pajak Penghasilan dan administrasi perpajakan bagi usaha panas bumi rezim lama dan rezim baru. Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif. Data yang digunakan diperoleh dengan cara melakukan wawancara mendalam dengan beberapa narasumber yang dianggap relevan dengan permasalahan yang diangkat. Berdasarkan hasil analisis, fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tersebut tidak sesuai dengan asas netralitas dan asas keadilan karena mendistorsi pilihan industri dalam melakukan impor barang, adanya kemungkinan barang yang diimpor oleh usaha panas bumi tidak benar-benar digunakan untuk kegiatan operasi panas bumi, serta menimbulkan perlakuan pajak yang berbeda dengan industri pertambangan lainnya. Implikasi fasilitas ini adalah meningkatnya Pajak Penghasilan Badan bagi rezim lama dan menurunnya Pajak Penghasilan Badan bagi rezim baru, serta lebih menghemat waktu dan biaya dalam proses pengajuan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dibandingkan fasilitas dibebaskan.

.....Non-collected Value Added Tax on imports of Taxable Goods for geothermal utilization activities is a policy to support government program related to electricity availability. Previously, the import had been given a Value Added Tax Exempted Facility. The mining industry that gets this facility is only the geothermal industry. Based on this background, researchers want to analyze the facility policy in terms of the principles of neutrality and the principle of justice, as well as to analyze the implications of these facility to the income tax expense and tax administration for the geothermal bussiness in the old & new regime. The research method used in this paper is a qualitative research method. The data used in this thesis is obtained by conducting in-depth interviews with several speakers who are considered relevant to the issues raised. Based on the analysis, Value Added Tax facilities that are not collected on imports of Taxable Goods are not in accordance with the principle of neutrality and tax justice, because they distort the choice of industry in importing taxable goods. There is a possibility that taxable goods imported by geothermal businesses are not actually used for activities in geothermal operations, and cause different treatment with other mining industries. The implication of this non-collected VAT facility is the increase in corporate income tax for the old regime and the decline in corporate income tax for the new regime, and it saves time and costs in the process of submitting facilities compared to the VAT facility that was previously applied.